

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA



Alamat: Jl. H. M. SAID NO. 27 MEDAN | Nomor Telepon: 061-4527254
Website: diskominfo.sumutprov.go.id | E-mail: diskominfo@sumutprov.go.id



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT

Jalan K.H.Wahid Hasyim Nomor 8, Medan, Kode Pos 20154
Telepon: (061) 415046 - 4524309. Faksimile: (061) 4150194
Pos-el: inspektorat@sumutprov.go.id Laman: inspektorat.sumutprov.go.id.

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Medan, 10 APRIL 2025

INSPEKTUR,

SULAIMAN HARAHAHAP, S.H., M.SP., CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19690610 199703 1 005

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKJIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKJIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Medan,

2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA



Dr. ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196701191988031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	4
1.3 Isu Strategis dan Permasalahan	6
1.4 Dasar Hukum.....	6
1.5 Sistematika Laporan Kinerja.....	7
BAB II	9
PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	9
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024.....	12
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	12
BAB III	17
AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Capaian Kinerja.....	17
3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	18
3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	24
3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	39

3.1.4	Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).....	41
3.1.5	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	42
3.1.6	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	45
3.1.7	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	45
3.2	Realisasi Anggaran.....	48
BAB IV		52
PENUTUP		52
LAMPIRAN		54

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	9
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024	10
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024.....	12
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024	14
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024	18
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja.....	25
Tabel 3.3 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	40
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota.....	41
Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	42
Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	44
Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	5
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Sumatera Utara diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKJIP).

Penyusunan Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 LKJIP yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara:

Komposisi Pegawai Dinas Kominfo Provsu per 31 Desember 2024

Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan

No		Jabatan	Jumlah
1		Jabatan Struktural	11
		Eselon II (Kepala Dinas)	1
		Eselon III (Kepala Bidang/Sekretaris	5
		Eselon IV	2
2		Jabatan Fungsional Analisis kebijakan Ahli Muda	4

Komposisi Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV-e / Pembina Utama	-
2	IV-d / Pembina Utama Madya	-
3	IV-c / Pembina Utama Muda	1
4	IV-b / Pembina Tk. I	4
5	IV-a / Pembina	4
6	III-d / Penata Tk. I	25
7	III-c / Penata	3
8	III-b / Penata Muda Tk. I	15
9	III-a / Penata Muda	1
10	II-d / Pengatur Tk. I	9
11	II-c / Pengatur	
12	II-b / Pengatur Muda Tk. I	1
13	II-a / Pengatur Muda	
	J u m l a h	63

Komposisi Pegawai berdasarkan Gender (Jenis Kelamin)

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan
1	IV-e	-	-
2	IV-d	-	-
3	IV-c	1	-
4	IV-b	2	2
5	IV-a	2	2
6	III-d	13	12
7	III-c	3	-
8	III-b	7	8
9	III-a	1	
10	II-d	6	3
11	II-c	-	-
12	II-b	1	-
13	II-a	-	-
Jumlah		36	27

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya secara hirarkis disusun struktur organisasi kelembagaan Dinas Kominfo Provsu terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
4. Bidang Aplikasi Informatika
5. Bidang Statistik Sektorial
6. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara melaksanakan urusan pemerintahan bidang Informasi dan Komunikasi Publik, bidang Aplikasi Informatika, bidang Statistik Sektorial, bidang Persandian dan Keamanan Informasi.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

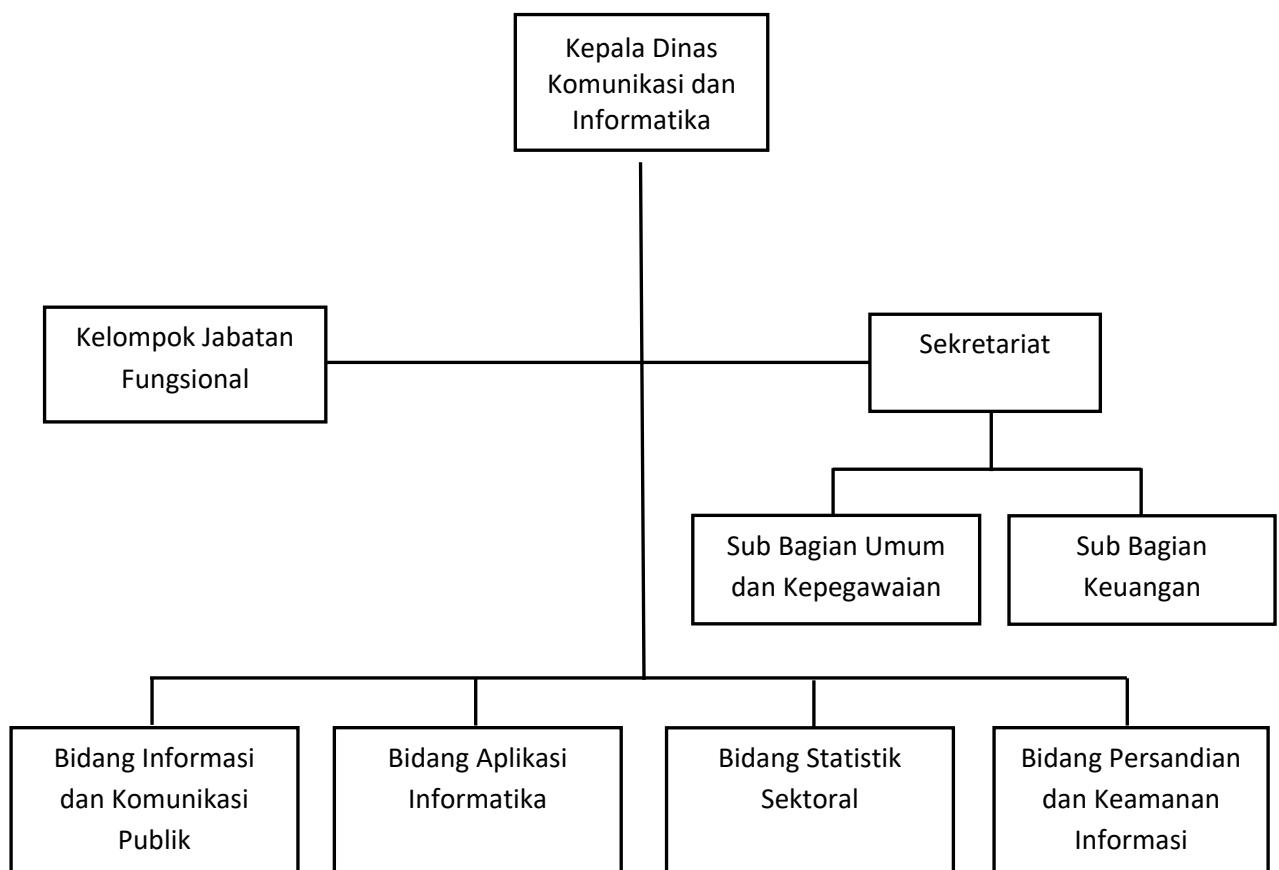
1. Perumusan kebijakan informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistika sektoral, persandian dan keamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan kebijakan informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral, persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Perumusan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistika sektoral, persandian dan keamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Perumusan administrasi kebijakan Pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral, persandian dan keamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Perumusan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

Sumber : Sub bagian Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara



1.3. Isu Strategis dan Permasalahan

Adapun isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya sarana dan Prasarana TIK
2. Belum Optimalnya penyebaran informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Pembangunan Satu data Digital Daerah
4. Integrasi Pelayanan digital pemerintah daerah melalui Sumut Smart province
5. Pengamanan Informasi dilingkup Pemerintah
6. Rendahnya SDM aparatur dibidang Persandian dan statistik

1.4. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

6. Surat Sekretaris Daerah Sumatera Utara Nomor 000.6.3/12/2024 tanggal 05 Januari 2024 Tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Perjanjian Kinerja (PK)

1.5. Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, adalah meningkatkan Infrastruktur TIK, pengolahan Data dan diseminasi Informasi dan Komunikasi. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya implementasi SPBE	Peningkatan Prasarana layanan TIK	Indeks penilaian Mandiri SPBE	-	-	4	4,2	4,5
2		Peningkatan Satu data Digital Daerah	Indeks pembangunan Statistik	-	-	1,8	2,2	2,3
3		Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	-	-	75 %	76 %	77 %
			Indeks keterbukaan Informasi Publik	-	-	85 %	85 %	86 %

Sumber : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu Periode 2024 -2026

Indikator Kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 tidak sama dengan Tahun 2024 .

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
1.	Meningkatnya implementasi SPBE	Indeks Penilaian Mandiri SPBE	point	SPBE adalah Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, pemerintah Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, Masyarakat, pelaku usaha dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai yang mempresentasikan Tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.	Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut $\text{Indeks Domain}_i = \frac{1}{10} \sum_{j=1}^n \frac{ND_j \times BD_j}{4}$ dimana: • NDj adalah nilai indeks domain ke-j; • BDj adalah nilai bobot domain ke-j.	Dinas Kominfo Provsu
2.	Meningkatnya Pembangunan Satu Data Digital Daerah	Indeks pembangunan Statistik	point	Indeks Pembangunan Statistik adalah ukuran yang menggambarkan kematangan penyelenggaraa	Nilai IPS : a. $4,2 > 5,0 =$ Memuaskan b. $3,5 < 4,2 =$ Sangat baik	BPS Pusat

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
				n statistik sektoral Indeks Pembangunan Statistik dihitung melalui evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dengan cara mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral instansi pemerintah pada setiap domain, aspek dan indikator.	c. $2,6 < 3,5 =$ Baik d. $1,8 < 2,6 =$ Cukup e. $< 1,8 =$ Kurang	
3.	Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik	persen	Indeks Pengelolaan Informasi Publik digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik, baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja Kementerian/ Lembaga, dan Dinas Kominfo	Survey yang dilaksanakan oleh Kemenkominfo RI	Kementerian Kominfo RI
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Persen	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penilaian Komisi Informasi Pusat	Komisi Informasi Pusat

Sumber: Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 dan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Berikut Rencana Kinerja

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
	Meningkatnya implementasi SPBE	1.	Peningkatan Prasarana layanan TIK	Indeks penilaian Mandiri SPBE	point	4
		2.	Peningkatan Satu data Digital Daerah	Indeks pembangunan	Point	1,8
		3.	Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	persen	75
				Indeks Keterbukaan Informasi Publik	persen	85

Sumber : Rencana Kerja Dinas Kominfo Provsu

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Penilaian Mandiri SPBE	4
2.	Meningkatnya Pembangunan Satu Data Digital daerah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	1,8
3.	Meningkatnya penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	75 %
		Indeks keterbukaan Informasi Publik	85 %

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo Provsu Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan TIK yang disediakan oleh dinas	100 %
	Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan Domain dan Sub Domain di Lingkungan Pemprov	100 %
	Sub Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	4 Unit
	Kegiatan : Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terkelolanya e-Government di Provinsi Sumatera Utara	1 Dokumen
	Sub Kegiatan : 1. Penatalaksanaan dan Pengawasan e- Government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen
	2. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem provinsi cerdas dan Kota cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen
	3. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit
	4. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit
2	Program : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi	100 %
	Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Tersebarnya Informasi dan Kebijakan Tentang Program Prioritas Pemerintah	100 %

	Sub Kegiatan : 1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	27 Dokumen
	2. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	980 dokumen
	3. Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 dokumen
	4. Kemitraan dengan Pemangku kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	12 dokumen
	5. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 dokumen
	6. Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	12 layanan
	7. Penguatan tata Kelola Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	12 dokumen
	8. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	12 dokumen
3	Program: Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang Menggunakan data statistik sektoral	99 %
	Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemprov	99 %
	Sub Kegiatan : 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	100 dokumen
	2. Penyelenggaraan otoritas Statistik Sektoral di daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	200 dokumen
	3. Membangun Metadata Statistik sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	9 OPD
4	Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Kematangan Keamanan Siber dan Sandi	98 %
	Kegiatan :	Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan	98 %

	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi, Pelaksanaan Keamanan Informasi pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik serta Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	
	Sub Kegiatan : 1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	1 dokumen
	2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	2 laporan
	Kegiatan : Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	10 perangkat daerah
	Sub Kegiatan : 1. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	10 perangkat daerah

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nama Perangkat Daerah Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024 – 2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kineja tahun ini

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Penilaian Mandiri SPBE	4	4,34	108,5	Dinas Kominfo provsu
	Meningkatnya Pembangunan Satu Data Digital daerah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	1,8	1,94	107,8	BPS Pusat
	Meningkatnya penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	75 %	81,04 %	108	Kementrian Kominfo RI
		Indeks keterbukaan Informasi Publik	85 %	82,07 %	96,6	Komisi Informasi Pusat

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

Uraian penjelasan tabel :

- I. Capaian kinerja pada sasaran strategis pertama, yaitu Meningkatnya Implementasi sistem Pemerintahan berbasis Elektronik dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Penilaian Mandiri SPBE dengan target 4. Pencapaian nilai indeks SPBE Pemprovsu tahun 2024 pada tahap penilaian mandiri sebesar 4,34 yang berarti melampaui target yang ditetapkan dimana penilaian dilakukan pada 47 (empat puluh tujuh) indikator yang di kelompokkan dalam 8 aspek dan 4 domain. Nilai Domain Kebijakan 5.0, nilai domain Tata Kelola SPBE 3,90, nilai Domain Manajemen SPBE 3,36 dan nilai domain Layanan SPBE 4,75. Nilai pada domain manajemen SPBE merupakan yang terendah khususnya pada aspek pelaksanaan audit TIK lebih spesifik pada indikator tingkat kematangan pelaksanaan audit keamanan SPBE yang diharapkan dapat ditingkatkan pada pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE tahun 2025. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Adapun proses pemantauan dan

evaluasi SPBE dimulai dengan tahapan penilaian mandiri yang dilakukan oleh Tim Asesor Internal Pemprov.

Adapun Program yang mendukung pelaksanaan SPBE adalah

A. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan kegiatan :

- 1). Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub domain dilingkup Pemerintah Daerah Provinsi dengan sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp. 8.125.786.800 dengan realisasinya Rp. 8.048.658.000,- (99,05 %)
- 2). Pengelolaan E- Government di Lingkup Pemerintah daerah Provinsi dengan sub kegiatan :
 - a). Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan anggran Rp. 147.500.000,- realisasi Rp. 134.391.490,-, (91,11%) ;
 - b). Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah anggarannya Rp. 14.850.727 dengan rtealisasi Rp. 14.652.000,-;(98,66 %),
 - c). Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan anggarannya Rp. 108.889.020,- realisasinya Rp. 55.286.687,- (50,77 %) ;
 - d). Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas dengan anggaran Rp. 2.000.000,- dengan realisasinya Rp. 2.000.000

B. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamnan Informasi

Indeks Keamanan Informasi merupakan bagaian pencapaian Indeks SPBE, tahun 2024 target Indeks Keamanan Informasi sebesar 450, sedangkan pencapaian tahun 2024 sebesar 452 atau 100,4%. Adapun kegiatan yang mendukung adalah:

- I. Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi dengan sub kegiatan :

- a). Penetapan kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi anggarannya sebesar Rp. 74.482.900,- dengan realisasinya Rp. 73.948.900,- (99,28%) melalui kegiatan ini telah dihasilkan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Tentang Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, Dimana untuk perkembangan sedang dilaksanakan proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI.
- b). Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggarannya Rp. 100.000.000,- dengan realisasinya Rp. 99.900.000,- (99,90%)
- II. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi dengan sub kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi, anggarannya sebesar Rp. 72.173.450,- dengan realisasi sebesar Rp. 63.007.490, (87,30%) Untuk kegiatan ini Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi sebanyak 42 OPD Provinsi Sumatera Utara

II). Untuk sasaran Strategis Meningkatnya Pembangunan Satu Data Digital Daerah dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Indeks Pembangunan Statistik Sektoral Tahun 2024 ditargetkan 1,8 dan realisasi pencapaian 1,94 dengan persentase pencapaian 107,8%. Capaian Indeks Pembangunan Statistik Provinsi Sumatera Utara juga meningkat 0,44 poin dari tahun sebelumnya hanya 1,50. Indikator Kinerja Utama yang mendukung Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral , kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Provinsi dengan sub kegiatan :

- a). Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan alokasi anggaran sebesar Rp166.043.350,-. dengan realisasi anggaran sebesar Rp.164.155.450,- (98,86%) dengan dihasilkannya 200 Dokumen Koordinasi dan Pembinaan yang dilakukan.
- b) Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun melalui kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral dengan alokasi anggaran sebesar Rp.12.748.900,- dan realisasi sebesar Rp. 12.100.000,- (94,91%) Dimana terdapat 39 Perangkat Daerah yang sudah menyampaikan Metadata Statistik dibandingkan target sebanyak 10 Perangkat Daerah yang menyampaikan Metadata dan jumlah ini juga meningkat dari tahun sebelumnya
- c) Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.624.450,- dan realisasi Rp. 45.624.450 (97,86 %) , dimana jumlah Data Statistik Sektoral yang dihasilkan sebanyak 627 data.

III). Sasaran Strategis meningkatnya penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik dengan indikator kinerja Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) target 75 persen dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik 85%. ndeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik merupakan tolok ukur pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Indeks PIKP sebagai instrumen strategis guna mewujudkan komunikasi publik yang lebih baik, lebih transparan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Adapun skor indeks PIKP rata rata nasional pada tahun 2024 berdasarkan

survey Kementerian Komunikasi dan Informatika senilai 71,79 poin naik satu poin dari tahun sebelumnya. Untuk capaian Sumatera Utara, Nilai

Berdasarkan nilai survei Indeks Pengelolaan Informasi Publik yang dilaksanakan Kementerian Komunikasi dan Informatika nilai Indeks PIKP Gabungan Sumatera Utara adalah 81,04 atau kategori sangat baik. Nilai gabungan terdiri dari nilai dimensi Input : 90,82; Dimensi proses : 91,18; Dimensi Output : 71,72 dan dimensi Outcome : 70,43. Indeks PIKP Sumut meningkat pesat dari tahun 2023 dengan Nilai Indeks PIKP Gabungan sebesar 69,8 % atau kategori sedang. Dengan demikian target sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 tercapai bahkan jauh melampaui. Peningkatan nilai IPKP tahun 2024 menunjukkan terdapat peningkatan akses informasi dan pemahaman publik akan kebijakan dan program pemerintah yang diharapkan mendorong partisipasi publik yang lebih luas.

Untuk Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Sumatera Utara pada tahun 2024 adalah 82,07. Nilai ini juga naik 2,40 poin dari tahun sebelumnya yaitu 79,67 dan berada di atas nilai nasional yaitu 75,65. Dengan nilai ini, Sumut menduduki urutan kelima Nilai IKIP tertinggi nasional setelah Provinsi Jabar, Jatim, Kaltim dan Sulteng.

Peningkatan skor IKIP menunjukkan upaya menghadirkan pemerintahan yang lebih terbuka dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kominfo. Skor ini mencerminkan sejauh mana pemerintah dan stakeholder di Sumut telah melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Capaian kinerja tersebut di atas dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Informasi dan

Komunikasi Publik melalui Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang terdiri atas Sub kegiatan berikut:

- a) Monitoring Opini dan Aspirasi Publik dengan anggarannya Rp. 396.005.000,- dengan realisasinya Rp. 388.905.000,- (98,21%);
- b).Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik dengan anggaran Rp. 342.458.250 realisasinya Rp.342.178.250,- (99,92%);
- c). Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan anggaran Rp. 9.704.339.525,- dengan realisasinya Rp. 9.251.125.280,- (95,33%);
- d). Pelayanan Informasi Publik dengan anggarannya Rp. 79.804.650,- dengan realisasinya Rp. 79.304.650,- (99.37%);
- e). Layanan Hubungan Media dengan anggaran Rp. 259.866.000,- realisasinyaRp. 259.866.000,- (100%);
- f). Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dengan anggaran Rp. 4.580.800.000,- dengan realisasinya Rp. 4.565.550.000,- (99,67%);
- g). Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dengan anggarannya Rp. 1.967.918.000,- realisasinya Rp. 1.956.238.707,- (99,41%);
- h). Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas dengan anggarannya Rp. 108.000.000,- realisasinya Rp. 108.000.000,- (100%).

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau Tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Tahun (n-1) 2023	Tahun (n-1) 2023	Tahun (n-1) 2024	Tahun (n-1) 2024	Sumber Data 2024
	2023	2024	2023	2024	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya Penyebaran Informasi Publik	Meningkatnya penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah	Jumlah informasi yang terpublikasi	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1013 kali	1013 kali	75 %	81,04 %	Kementerian Kominfo RI
				Indeks keterbukaan Informasi Publik			85 %	82,07 %	
	Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan Sumatera Utara	Meningkatnya Pembangunan Satu Data Digital daerah	Persentase data OPD yang terhimpun	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	90 %	100 %	1,8	1,94	Bidang Statistik
	Meningkatnya Pelaksanaan Sistem Berbasis elektronik	Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Persentase Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi	Indeks Penilaian Mandiri SPBE	75 %	92 %	4	4,34	Bidang TIK
	Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi		Persentase perangkat daerah yang memahami persandian dan keamanan informasi		50 %	100 %			

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu

Uraian penjelasan tabel :

Untuk realisasi capaian kinerja tahun 2024 sudah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 105,2 %. Untuk Indikator kinerja utama tahun 2024 tidak sama dengan tahun sebelumnya, karena tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis tahun 2019 - 2023, sedangkan Indikator kinerja Utama tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis tahun 2024-2026.

Tahun 2023

A. Pencapaian sasaran strategis ini, Jumlah Informasi yang terpublikasi dengan capaian kinerja sebanyak 1386 kali dengan realisasi kinerja sebesar 1384 (99 %) kali dengan kriteria penilaian kinerja “sangat tinggi “ melalui kegiatan:

- 1) Monitoring dan Aspirasi Publik melalui kegiatan : Dialog dalam studio RRI targetnya 12 kali, realisasi kinerja 12 kali, dialog di TVRI targetnya 12 kali realisasi kinerja 12 kali , dialog di luar studio RRI targetnya 4 kali realisasi kinerja 4 kali; Dialog Interaktif Gubernur dan Wakil Gubernur dengan masyarakat 3 kali dengan realisasi 2 kali .
- 2) Pengelolaan Konten dan Media Komunikasi Publik melalui kegiatan Berita Sumut targetnya 300 kali realisasi kinerja 300 kali, publikasi pesan melalui radio targetnya 280 kali realisasi kinerjanya 280 kali, Iklan di media online skala nasional 120 kali realisasi kinerjanya 120 kali Cetak Baliho untuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau type 1 targetnya 4 kali realisasi kinerjanya 4 kali, baliho type 2 targetnya 8 kali realisasi kinerja 8 kali; baliho type 3 targetnya 4 kali realisasi kinerjanya 4 kali, Spanduk targetnya 84 kali realisasi kinerjanya 84 kali, iklan surat kabar lain-lainnya 6 kali realisasi kinerjanya 6 kali dan iklan surat kabar full colour targetnya 3 kali realisasi kinerjanya 3 kali; Iklan di media cetak online skala Nasional targetnya 12 kali, realisasi kinerjanya 12 kali. Untuk kegiatan Rutin publikasi Dinas

Kominfo Provsu melalui cetak baliho adalah baliho type 1 targetnya 10 buah realisasinya 10 kali, baliho type 2 targetnya 51 kali realisasinya 51 kali, type 3 targetnya 30 kali realisasinya 30 kali, spanduk targetnya 338 kali realisasinya 337 kali, selanjutnya kegiatan adventorial di media cetak targetnya 36 kali realisasinya 36 Laporan Kinerja Dinas Kominfo Provsu tahun 2022 19 kali, adventorial di 7 media cetak targetnya 7 kali, realisasinya 7 kali; iklan di surat kabar harian targetnya 45 kali realisasinya 45 kali; iklan surat kabar harian lain- lain (full colour) targetnya 15 kali dengan realisasi 15 kali,

- 3) Pelayanan Informasi Publik melalui kegiatan Rakor PPID dengan target 1 kali realisasi kinerja 1 kali
 - 4). Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan melalui pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di kabupaten/kota realisasi capaian kinerja 1 kali.
- B. Persentase jumlah data OPD yang dihimpun sebanyak 42 Organisasi Perangkat Daerah OPD yaitu : Dinas Sosial Provsu, Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provsu, Dinas Pendidikan Provsu, Dinas Kesehatan Provsu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu, Dinas Ketenagakerjaan Provsu, Sekretariat DPRD Provsu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provsu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu, Badan Pendapatan Daerah Provsu, Biro Administrasi Pimpinan Provsu, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provsu, Biro Umum Setdaprovsu, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Provsu, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provsu, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provsu, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provsu, Badan Penghubung Daerah Provinsi, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provsu, Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu, Biro Organisasi Setdaprovsu, Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu, Dinas Perhubungan Provsu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu, Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Provsu, UPTD Khusus RSJ Prof. Dr. M. Ildrem Provsu, UPTD Khusus RSUD Haji Medan Provsu, Biro Hukum Setdaprovsu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provsu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu, Satuan Polisi Pamong Praja Provsu, Badan Kepegawaian Provsu, Inspektora Provsu, Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu, Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provsu , dan Biro Perekonomian Setdaprovsu

- C Persentase Infrastruktur Teknologi TIK yang terintegrasi dengan target kinerjanya 75%, realisasi capaian kinerja 92 %, dimana setiap tahun adanya peningkatan jumlah aplikasi yang terhubung di Sumut Smart Province. Adapun aplikasi OPD yang terhubung di Sumut Smart Province berjumlah 146 aplikasi dari 39 OPD. Adapun OPD yang terhubung di Sumut Smart Province adalah: Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu, Sekretariat DPRD Provsu, Badan kepegawaian Daerah Provsu, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan perlindungan Masyarakat Provsu, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu, Badan Pendapatan Daerah Provsu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provsu, Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian dan Pengembangan Provsu, Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu, Biro Pengadaan barang dan Jasa Setdaprovsu, Biro Organisasi Setdaprovsu, Biro Hukum Setdaprovsu, Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif , Dinas kelautan dan Perikanan Provsu, Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provsu, Dinas Kesehatan Provsu, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provsu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kependudukan dan Catatan Sipil Provsu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provsu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provsu. Dinas Pendidikan

Provsu, Dinas Perhubungan Provsu, Dinas Perindustrian, perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu, Dinas Dinas Perkebunan dan Peternakan Provsu, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu, Dinas Tenaga Kerja Provsu, Badan Satpol PP, Rumah Sakit Jiwa Prof. DR. Muhammad Ildrem, Inspektorat Provsu, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Administrasi Pimpinan Setdaprovsu, Biro Perekonomian Setdaprovsu, Biro Pemerintahan dan Otda Setdaprovsu, UPTD Rumah Sakit Umum Haji Medan Provsu dan Badan penanggulangan Bencana Provsu.

Dengan demikian ada 3 Organisasi Perangkat daerah yang belum terhubung di Smart Province yaitu Dinas Sosial, Biro Umum dan Badan penghubung.

Daftar Aplikasi OPD Provsu Yang Terhubung di Portal Sumut Smart Province

NO	NAMA APLIKASI	URL/Alamat Aplikasi	OPD Penanggung Jawab
1	1. E-PLANNING 2. GEOPORTAL PROVINSI SUMATERA UTARA 3. SEPPEDA (Sistem pengendalian Prioritas Pembangunan Daerah) 4. Inovasi Jurnal Publik dan Kebijakan 5. E-Sumut 6. SSH 7. Bijak Pintar Pembangunan	https://eplanning.sumutprov.go.id/backend/web/index.php http://geoportal.sumutprov.go.id/index.html http://bappeda.sumutprov.go.id/sepeda/ http://jurnal.balitbang.sumutprov.go.id/ https://esumut.sumutprov.go.id/ https://satuanharga.sumutprov.go.id/login/view_login https://bijakpintarpembangunan.sumutprov.go.id/	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

	8. DIGINOMI (Digital Ekonomi)	https://diginomi.sumutprov.go.id/Login	
2	1. PAKET KERAS 2. KAREJO (Kinerja Aparatur Dengan Jaringan Online) 3. Pusat Penilaian Kompetensi ASN 4. ARSIP DIGITAL 5. Cetak Simpeg 6. E-Kinerja	http://simpegbkd.sumutprov.go.id/site/login http://karejo.sumutprov.go.id/site/login https://pusatasesmen.sumutprov.go.id/Assessment-Landing/ https://arsipbkd.sumutprov.go.id/ https://simpegcetak.sumutprov.go.id/ https://ekinerja.sumutprov.go.id/	Badan Kepegawaian Daerah Provsu
3	1. E-Kuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2. DRUPADI (daftar Uraian Pemberhentian Pembayaran BPKAD digital 3.SIMBADA/ SI ANAK DARA (Sistem Penatausahaan, Keamanan, dan Pemeliharaan Aset Sumatera Utara 4.SIAP Keuda On Air	http://ekeuangan.sumutprov.go.id/ http://simbada.sumutprov.go.id/ http://simbada.sumutprov.go.id/ https://siapapp.sumutprov.go.id/ https://simplereaksi.sumutprov.go.id/login/view_login	Badan Keuangan dan Aset Daerah Daerah Provsu

	5. SIMPEL REAKSI 6. SEMERBAK 7. Peta Informasi	https://semerbak.sumutprov.go.id/ http://petainformasi.sumutprov.go.id/	
4	1. JDIHPROVIN SI SUMATERA UTARA (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) 2. SIDBANKUMDA 3. SI-EDA 4. SIKKOMPAS	http://jdih.sumutprov.go.id/ https://sidbankumda.sumutprov.go.id/ https://birohukum.sumutprov.go.id/sieda/login.php https://birohukum.sumutprov.go.id/sikkompas/login.php	Biro Hukum Setda Provsu
5	1. APLIKASI PORTAL E-ASN 2. Covid -19 SUMUT 3. KBS SumutProv 4. E-Monev 5. Cloud Storage 6. SINIKEMAS 7. Aplikasi Manajemen Surat KPID 8. KPID 9. KIP 10. E- HIBAH 11. SPBE Sumut 12. VALUE 13. OS Tiket 14. CSIRT 15. E-SATA 16. Sumut Smart Province	https://easn.sumutprov.go.id/e-asn/ https://covid19.sumutprov.go.id/ https://kbs.sumutprov.go.id/ https://e-monev.kip.sumutprov.go.id/ https://cloudstorage.sumutprov.go.id/index.php/login https://sinikemas.sumutprov.go.id/ http://arsipkpid.sumutprov.go.id/ https://kpid.sumutprov.go.id/ http://kip.sumutprov.go.id/ https://ehibahkesra.sumutprov.go.id/ https://spbe.sumutprov.go.id/login	Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu

	7. Data Warehouse 18. Dashboard Pimpinan 19. Tata Kelola Tik 20. Contact Center 1. Statistik sektoral 22. SISUMAKER 23. Mail 24. PPID	https://value.sumutprov.go.id/login https://osticket.sumutprov.go.id/ https://csirt.sumutprov.go.id/ https://e-sata.sumutprov.go.id/e-asn/ https://newsmartprovince.sumutprov.go.id/ https://datawarehouse.sumutprov.go.id/Login https://sie.sumutprov.go.id/Landingpage https://tatakelolatik.sumutprov.go.id/ https://contactcenter.sumutprov.go.id/Login http://statistiksektoral.diskominfo.sumutprov.go.id/ http://sisumaker.sumutprov.go.id/ https://mail.sumutprov.go.id/ http://ppid.sumutprov.go.id/	
6	1.siHarapanKu (PIHPS) 2.WEBGIS Kawasan Industri 3. Toko Online Perempuan Sumut 4. SIMANIS 5. Dekranasda Provsu	https://hargapangan.sumutprov.go.id/ http://webgisperindag.sumutprov.go.id/ https://topsumut.sumutprov.go.id/ http://simanis.sumutprov.go.id/ http://dekranasda.sumutprov.go.id/	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

7	1. SPBE Dinas Lingkungan Hidup 2. Aplikasi Manajemen Laboratorium	http://dislh.sumutprov.go.id/dashboard/ https://labdislh.sumutprov.go.id/	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu
8	1. DATABASE JALAN DAN JEMBATAN 2. Sipeka uptck Sibolga 3. SIJUARA AKSI 4. SISDA	http://jalan.sumutprov.go.id/ https://sipekauptcksibolga.sumutprov.go.id/ https://sijuaraaksi.sumutprov.go.id/ http://sisda.sumutprov.go.id/	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	1. SIGA 2. SIAK ANDALIMAN GDPK PROVSU 3. SIPPAREGE 4. SEPPPA 5. E-Kekerasan 6. SICEKATAN KAMPUNG KB 7. SIPENTING	http://siga.sumutprov.go.id/ https://gdpk.sumutprov.go.id/ https://sipparege.sumutprov.go.id/ http://sepppa.sumutprov.go.id/ http://kekerasan.sumutprov.go.id/ https://kampungkb.sumutprov.go.id/ https://sipenting.sumutprov.go.id/	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provsu
10	1. PRP2 Sumut 2. OPAK	http://prp2sumut.sumutprov.go.id/ http://opak.sumutprov.go.id/index.php/id/	Biro Administrasi Pembangunan
11	1. PAJAK DAERAH 2. E-RETRIBUSI 3. E-Samsat Mobile	http://pajak.sumutprov.go.id/ http://retribusi.sumutprov.go.id/ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ba	Badan Pendapatan Daerah

		nksumut.samsatmobile&pli=1	
12	1. STATISTIK PERKEBUNAN PROVSU 2. WASPUKSUB	http://disbun.sumutprov.go.id/statistik_2018/ https://waspuksub.sumutprov.go.id/	Dinas Perkebunan dan Peternakan
13	1. SIAPLAYANI 2. Peta Potensi dan Peluang Investasi Provsu	https://siaplayani.sumutprov.go.id/ https://disperpusipprovsu-reservasibuku.my.id/	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
14	1. PERPUSTAKAAN DIGITAL 2. GPMB Sumut 3. E-Library	https://kubuka.id/disperpusipprovsu/ https://disperpusipprovsu-reservasibuku.my.id/ http://elibrary.disperpusipprovsu.xyz/inlislite3/	Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu
15	1. DAPODIK 2. E-Supervisi 3. PAKDE GURU 4. MARKAS PINTAR 5. Siap App	https://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/guru/1/070000 http://ppdb.disdik.sumutprov.go.id/public/ https://bos.disdik.sumutprov.go.id/index.php/site/login https://markaspintar.sumutprov.go.id/login/viewlogin https://siapapp.sumutprov.go.id/	Dinas Pendidikan Provsu
16	1. SIMPOLPP 2. SIPOLES	https://simpolpp.sumutprov.go.id/ https://sipoles.sumutprov.go.id/	Satuan Polisi Pamong Praja Provsu

17	1. CORNER PKP PROVSU 2. Layanan Rumah 3. PKP SADA 4. Database Dinas PKP 5. SIM HSB 6. Pesuratan Dispkip 7. E-Monitoring	http://dispkip.sumutprov.go.id/corner2/ http://layanrumah.dispkip.sumutprov.go.id/ https://pkpsada.sumutprov.go.id/ http://data.dispkip.sumutprov.go.id/ http://hsb.dispkip.sumutprov.go.id/ https://persuratan.dispkip.sumutprov.go.id/ http://emonitoring.dispkip.sumutprov.go.id/	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu
18	DASHBOARD INFORMASI RUMAH SAKIT	https://rsj.sumutprov.go.id/information/	Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Pvsu
19	1. SINDANG SUMUT (Sistem Informasi Data dan Edukasi pengupahan Sumatera Utara) 2. RESPEK 3. SiLAPER 4. Buku Saku	http://sindang.sumutprov.go.id/guest http://respekdisnakerprovsumu.com/ https://silaper.sumutprov.go.id/ https://disnaker.sumutprov.go.id/buku-saku/index	Dinas Ketenagakerjaan Provsu
20	1. SIKAPAS (Sistem Elektronik Kartu Pengawasan) 2. SIMINAL (Sistem Informasi Manajemen Terminal)	http://sikapas.sumutprov.go.id/guest http://siminal.sumutprov.go.id/guest	Dinas Perhubungan Provsu

	3. E-KPS 4. SIPASK 5. FLLAJ 6. SIMAK	https://ekps.sumutprov.go.id/ http://sipask.sumutprov.go.id/ https://flaj.sumutprov.go.id/ https://simak.sumutprov.go.id/	
21	SIJADIN	https://sijadin.sumutprov.go.id/	Sekretariat DPRD Provsu
22	EKESBANGPOL	https://ekesbangpol.sumutprov.go.id/	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
23	1.SIBANGKOM-BPSDM 2.DASIPAKNAS 3.SI PENAPINTAR 4.SIBERMARTABAT	https://sibangkom-bpsdm.sumutprov.go.id/ https://dasipaknas.sumutprov.go.id/ https://jawara-sibermartabat.sumutprov.go.id/ https://sibermartabat.asnunggul.lan.go.id/	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provsu
24.	1. CAGARBUDAYA 2. DISUMUTAJA	https://cagarbudaya.sumutprov.go.id/ https://disumutaja.com/	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provsu
25	1. Aplikasi manajemen Laboratorium 2. SPBE	https://labdislh.sumutprov.go.id/ https://dislh.sumutprov.go.id/dashboard/	Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provsu
26	SIP3	https://sip3dkp.sumutprov.go.id/	Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu
27	1.SIMANJANO 2.SUMUTADA 3.E Pro Lab	https://simanjanone.sumutprov.go.id/ https://sumutada.sumutprov.go.id/	Dinas kesehatan Provsu

	4. SIMANJA- NAVARA 5. SIPJJ Online 6. SiPISTAR 7. QR DINKES	https://labkes.sumutprov.go.id/ http://206.189.94.13:84/ https://sipji-online.sumutprov.go.id/ https://pelatihansipistar.sumutprov.go.id/login https://qrdinkes.sumutprov.go.id/	
28	E-DKPP	https://edkpp.dishanpangternak.sumutprov.go.id/	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provsu
29	1.SIPPP 2.SILADANG 3.SILANGDASI 4.Kurasi Plut 5.SIKONCO	https://sippp.sumutprov.go.id/ https://siladang.sumutprov.go.id/ https://silangdasi.sumutprov.go.id/ https://kurasiplut.sumutprov.go.id/login https://sikonco.plut.sumutprov.go.id/	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provsu
30	1.PPLPDISPORA 2.SIPLAHATLETPPLP	https://pplpdispora.sumutprov.go.id/ https://siplahatletpplp.sumutprov.go.id/	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provsu
31	1. LPSE 2. SiRajaSumut 3. Rekapitulasi RUP Pemprovsu	https://lpse.sumutprov.go.id/ https://sirajasumut.sumutprov.go.id/ https://sirup.lkpp.go.id/sirup/home/rekapKldi?idKldi=D498	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
32	1. ESAKIP 2. SIMPAN RB 3. SIANJAB	https://esakip.sumutprov.go.id/	Biro Organisasi

		https://simpanrb.sumutprov.go.id/ https://sianjab.sumutprov.go.id/web/index.php?r=site%2Findex2	
33	E-Hibah	https://ehibahkesra.sumutprov.go.id/	Biro Kesejahteraan Rakyat
34	1. WBS Pemprowsu 2. SIDAK SIAP 3. SP4N LAPOR	https://wbs.sumutprov.go.id/ https://sidaksiap.sumutprov.go.id/ https://sumutprov.lapor.go.id/	Inspektorat
35	Baleno	http://103.15.242.94:5353/adpim/	Biro Administrasi Pimpinan
36	TPAKD	https://tpakd.sumutprov.go.id/	Biro Perekonomian
37	1. Perjalanan Dinas Luar Negeri 2. Kerja Sama	https://pdl.sumutprov.go.id/ https://ksd.sumutprov.go.id/	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
38	SIMRS	http://202.52.59.6/live/Login/Login.aspx?RetunUrl=/live/	UPTD.Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan Provsu
39	Kaji Cepat	http://sikajicepatbcbd.sumutprov.go.id/	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu

D. Persentase Perangkat Daerah yang memahami Persandian dan Keamanan Informasi sebanyak 42 Organisasi Perangkat Daerah yaitu: sudah memahami persandian dan keamanan Informasi yang terdiri dari : Dinas Sosial Provsu, Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Provsu, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provsu, Dinas Pendidikan Provsu, Dinas Kesehatan Provsu , Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu, Dinas Ketenagakerjaan Provsu, Sekretariat DPRD Provsu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Provsu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provsu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu, Badan Pendapatan Daerah Provsu, Biro Administrasi Pimpinan Provsu, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provsu, Biro Umum Setdaprovsu, Dinas Ketahanan Pangan . Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provsu , Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provsu, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provsu, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provsu, Badan Penghubung Daerah Provinsi, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provsu, Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu, Biro Organisasi Setdaprovsu, Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu, Dinas Perhubungan Provsu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu, UPTD Khusus RSJ Prof. Dr. M. Ildrem Provsu, UPTD Khusus RSUD Haji Medan Provsu, Biro Hukum Setdaprovsu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provsu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provsu, Satuan Polisi Pamong Praja Provsu, Badan Kepegawaian Provsu, Inspektora Provsu, Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu, Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provsu , dan Biro Perekonomian Setdaprovsu

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Sumatera Utara periode 2024 – 2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahunan	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.	Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Penilaian Mandiri SPBE	4,34	4,5	95,6
2.	Meningkatnya Pembangunan satu data digital daerah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	1,94	2,3	84,4
3.	Meningkatnya penguatan tata kelola informasi dan komunikasi Publik (IKP)di daerah	Indeks pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	81.04 %	77 %	105,2
		Indeks keterbukaan Informasi Publik	82.07 %	85,5 %	95,99

Sumber : Sub bagian Keuangan Dinas Kominfo Provsu

Uraian penjelasan tabel :

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara 3 (tiga) yaitu Indeks Penilaian Mandiri SPBE pada Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dan Program penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi; Indeks Pembangunan Statistik (IPS) pada Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Indeks pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Indeks keterbukaan Informasi Publik pada program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan realisasi

kinerja sudah sesuai dengan target akhir Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara .

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Nasional/Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.	Meningkatnya Pembangunan satu data digital daerah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	1.94	2,35	82,60..

Sumber : Dinas Kominfo Provsu

Perbandingan realisasi kinerja 2024 dengan standar nasional belum mencapai target nasional, hal ini disebabkan eluruh aspek belum mencapai predikat baik dan seluruh indikator belum ada yang mencapai tingkat kematangan terdefinisi .Indeks Pembangunan Statistik Provinsi Sumatera Utara meningkat dari tahun sebelumnya dari 1.50 menjadi 1.94 dengan kategori Cukup. Nilai ini diperoleh melalui kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang menilai 5 Domain, 19 Aspek dan 38 Indikator dengan pembobotannya masing-masing.

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Penilaian Mandiri SPBE	4	4,34	108,5
	Meningkatnya Pembangunan satu data digital daerah	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	1,8	1,94	84,4
	Meningkatnya penguatan tata kelola informasi dan komunikasi Publik (IKP) di daerah	Indeks pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	75 %	81,04 %	105,2
		Indeks keterbukaan Informasi Publik	85 %	82,07 %	95,99

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu

Uraian penjelasan tabel :

Analisa keberhasilan

Pada bahasan di atas, telah dijelaskan secara komprehensif bahwa secara umum capaian kinerja berdasarkan analisis keberhasilan berdasarkan sasaran strategisnya adalah :

1. Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) denhan indikator Indek penilaian mandiri SPBE dengan target 4 realisasi capaian kinerja 4,34 keberhasilan ini didukung oleh faktor Peningkatan layanan Sistem pemerintahan berbasis Elektronik baik layanan administrasi pemerintahan maupun layanan Publik
2. Meningkatnya Pembangunan satu data digital daerah dengan target 1,8 realisasi capaian kinerjanya 1,94 point keberhasilan ini disebabkan karena sudah menerapkan proses bisnis statistik dengan baik dan sudah terlibat dalam penyelenggaraann statistik Nasional yang ditandai dengan nilai IPS pada domain Statistik Nasional yang sudah berada diatas rata-rata nilai Nasional
3. Meningkatnya penguatan tata kelola informasi dan komunikasi Publik (IKP) di daerah, yang terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu 1). Indeks Pengelolaan Informasi Publik dengan target 75 % capaian kinerja 85 % berdasarkan analisis keberhasilannya karena adanya Peningkatan akses informasi dan pemahaman publik dengan target akan kebijakan dan program Pemerintah, serta meningkatkan kerjasama yang sinergis antara Pemerintah Provinsi dengan media komunikasi Publik
4. 2). Indeks keterbukaan Informasi Publik dengan target 85 %, capaian kinerjanya 82,07 nilai ini naik 2,40 point dari tahun sebelumnya, dimana Provinsi Sumatera Utara termasuk pada peringkat 5, dilihat dari capaian tersebut menunjukkan bahwa masih adanya tantangan dalam inplementasi keterbukaan informasi . Adapun Faktor penghambat adalah kurangnya kepatuhan dari Badan Publik dalam menyediakan informasi yang transparan dan mudah diakses. Masih ditemukam instansi yang belum sepenuhnya memahami atau berkomitmen terhadap regulasi keterbukaan informasi, sehingga pelaksanaannya tidak optimal.Selain itu juga keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia menjadi endala dalam pengelolaan informasi. Banyak Badan Publik belum memiliki sustemteknologi yangmemadai untuk mendukung transparansi, sementara tenaga pengelola informasi masih minim dari segi jumlah maupun kompetensi.

Rekomendasi

1. Untuk terus mencapai hasil indeks ke tingkat yang lebih optimal, disamping mempertahankan dan memperkuat kinerja yang ada,

kinerja di beberapa indikator masih harus terus ditingkatkan terutama dalam hal infrastruktur teknologi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan integrasi dan interoperabilitas sistem, memperkuat keamanan data, melakukan evaluasi dan monitoring berkelanjutan, memperkuat regulasi dan kebijakan, serta meningkatkan standarisasi dan audit terhadap seluruh rangkaian aktifitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta mendorong dan menciptakan kolaborasi serta kemitraan kepada semua stakeholder.

2. Peningkatan Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) dan kualitas data
3. Penguatan Infrastruktur serta edukasi kepada Masyarakat agar lebih aktif dalam mengakses hak atas informasi publik dan perlu dilakukan perbaikan dalam kepatuhan Badan Publik.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
					(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4	4,34	108,5	8.624.443.247,-	8.489.844.567,-	98,44	
	Meningkatnya Pembangunan satu data	1,8	1,94	84,4	225.416.700,-	221.879.900,-	98,43	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%	
					(Rp.)	(Rp.)	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	digital daerah							
	Meningkatnya penguatan tata kelola informasi dan komunikasi Publik (IKP)di daerah	75 %	81,04	105,2	17.439.191.525	16.951.167.887	97,20	

Sumber : Subbag Keuangan Dinas Kominfo Provsu

Uraian penjelasan tabel:

Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan anggaran sebesar Rp 26.310.291.122,- dan realisasinya Rp. 25.662.892.354,- (97,54) % dengan kategori sangat tinggi.

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

[illegible]

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Pemerintah Daerah provinsi				
	Meningkatnya Pembangunan satu data digital Daerah	Indeks pembangunan Statistik (IPS)	1,94	Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase OPD yang Menggunakan data statistik sektoral	98,43	Menunjang	
	Meningkatnya penguatan tata kelola informasi dan komunikasi Publik (IKP)di daerah		81,04	Program: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi	97,20	Menunjang	

Sumber :Sub Bagian Keuangan Dinas Kominfo Provsu

Uraian penjelasan tabel:

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari masing-masing indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang menunjang tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara selain itu juga realisasi dari capaian Indikator kinerja sudah terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh

Tabel 1.2 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun 2023	Rp. 62.540.815.364,-
APBD	Tahun 2024	Rp. 59.976.542.490,-
Sumber Lainnya (Jika Ada)		Rp -

Sumber : Sub Bagian Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu

Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 1. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 2. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 3. Pelayanan Informasi Publik 4. Pengelolaan Media Komunikasi Publik 5. Layanan Hubungan Media 6. Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan 7 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 8 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Rp 17.439.191.525.- Rp 17.439.191.525.- Rp 396.005.000,- Rp 342.458.250,- Rp 79.804.650,- Rp 9.704.339.525,- Rp 259.866.000,- Rp 4.580.800.000,- Rp 1.967.918.100,- Rp 108.000.000,-	Rp 16.951.167.887.- Rp 16.951.167.887.- Rp 388.905.000,- Rp 342.178.250,- Rp 79.304.650,- Rp 9.251.125.280,- Rp 259.866.000,- Rp 4.565.550.000,- Rp 1.956.238.707,- Rp 108.000.000,-	97,20% 97,20% 98,21% 99,92% 99,37% 95,33% 100% 99,67% 99,41% 100%
2.	Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 1.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 2.Membangun Metadata Statistik Sektoral 3.Penyelenggaraan Otoritas Statistik	Rp 225.416.700,- Rp 225.416.700,- Rp 166.043.350,- Rp 12.748.900,- Rp 46.624.450,-	Rp 221.879.900,- Rp 221.879.900,- Rp 164.155.450,- Rp 12.100.000,- Rp 45.624.450,-	98,43% 98,43% 98,86% 94,91% 97,86%

3.	Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kegiatan : Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sub Kegiatan : 1. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas 3. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 4. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp 8.399.026.547,- Rp 8.125.786.800,- Rp 8.125.786.800,- Rp 273.239.747,- Rp 147.500.000,- Rp 2.000.000,- Rp 14.850.727,- Rp 108.889.020,-	Rp 8.252.988.177,- Rp 8.048.658.000,- Rp 8.048.658.000,- Rp 204.330.177,- Rp 134.391.490,- Rp 2.000.000.- Rp 14.652.000,- Rp 55.286.687,-	98,26% 99,05% 99,05% 74,78% 91,11% 100% 98,66% 50,77%
----	--	--	---	--

4.	Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp 246.656.350,-	Rp 236.856.390,-	96,03%
	Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 174.482.900,-	Rp 173.848.900,-	99,64%
	Sub Kegiatan : 1. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 74.482.900,-	Rp 73.948.900,-	99,28%
	2. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 100.000.000,-	Rp 99.900.000,-	99,90%
	Kegiatan : Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Rp 72.173.450,-	Rp 63.007.490,-	87,30%
	Sub Kegiatan : 1. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Rp 72.173.450,-	Rp 63.007.490,-	87,30%

Sumber : Sub Bagian Keuangan Dinas Kominfo Provsu Ta. 2024

Uraian penjelasan tabel:

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa program dan kegiatan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara dengan pagu Anggaran Rp.59.976.542.490,- dengan realisasinya Rp. 57.261.211.686,- (95,47 %). dengan kategori sangat tinggi.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Penyusunan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKJIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dimana masing-masing sasaran strategis tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara adalah Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara masih rendah dibidang Teknologi Informatika, Statistik dan Persandian serta anggaran yang terbatas
1. Rekomendasi langkah perbaikan dengan mengikuti Pelatihan/ Bimtek dan Workshop.

2. Rekomendasi langkah perbaikan, Peningkatan Anggaran
3. Rekomendasi langkah perbaikan Peningkatan Frekuensi kegiatan
4. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan diatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun .

Medan, Januari 2025

Kepala Dinas Komunikais dan Informatika
Provinsi Sumatera Utara



DR. ALYAS S. SITORUS, SE, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196701191988031002

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024 Dilampirkan Scan PK Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA			
Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara		Tahun : 2024	
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan pengakuan data kelembagaan dan komunikasi publik	Persentase Masyarakat yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah termasuk kadesin (kadesin, dan agenda prioritas Nasional) tema : Protokol Kesehatan, Vaksin, Stunting, SDI Sesuai Strategi Komunikasi	85%
2	Meningkatkan Satu Data Digital Daerah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata ke sistem pusat standar	95%
3	Meningkatkan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan manfaat pelayanan melalui SPBE yang diwujudkan oleh Daerah	2%
4	Meningkatkan pengkajian pendanaan dan keamanan Informasi Daerah	Jumlah tulus peningkatan kompetensi SDM pengelola sistematis liter	5 orang

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pengabdian Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 7.351.688.000	APBD dan DPH-CHT
2. Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp. 92.973.980	APBD
3. Pengembangan Aplikasi Informatika	Rp. 310.845.500	APBD
4. Penyelenggaraan Pemantauan untuk Pengawasan Informasi	Rp. 100.000.000	APBD
TOTAL	Rp. 8.095.507.480	

Medan, 26 Maret 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

HASSANUDIN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA,

Dr. ILYAS S. SITORUS, SE., M.Pd
PEMBAINA UTAMA MUDA
NIP. 196701191988031002

Dr. ILYAS S. SITORUS, SE., M.Pd
PEMBAINA UTAMA MUDA
NIP. 196701191988031002

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024

Dilampirkan Scan Perubahan PK Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. ILYAS S. SITORUS, SE., M.Pd
Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Dr. Drs. A. FATONG, M.Si
Jabatan : PJ. GUBERNUR SUMATERA UTARA

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu pada tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perubahan perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 2024

Pihak Kesatu,
PJ. GUBERNUR SUMATERA UTARA,
Dr. Drs. A. FATONG, M.Si

Pihak Kedua,
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA,
Dr. ILYAS S. SITORUS, SE., M.Pd
PEMUDA UTARA MELIA
NIP. 196701119198031002

LAMPIRAN
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara
Tahun : 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menghasilkan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Peningkatan SPBE	4
2	Meningkatkan Pengembangan Satu Data Digital	Indeks Pengembangan Sistem (PS)	1,8
3	Meningkatkan Pengaplikasian Sistem Informasi dan Komunikasi Publik (SIKP) di Daerah	Indeks Peningkatan Efisiensi dan Komitmen Publik	75%
4	Meningkatkan Pemanfaatan Lintas Penguasaan Informasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	85%

Program	Anggaran	Realisasi
1. Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 17.436.151.525	R. 4950 dan 1004.017
2. Pengembangan Statistik Sektor	Rp. 222.424.700	R. 4950
3. Pengembangan Aplikasi Informatika	Rp. 5.395.628.347	R. 4950
4. Pengembangan Pemanfaatan Lintas Penguasaan Informasi	Rp. 246.856.350	R. 4950
TOTAL	Rp. 26.310.261.122	

Medan, 2024

PJ. GUBERNUR SUMATERA UTARA,
Dr. Drs. A. FATONG, M.Si

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA,
Dr. ILYAS S. SITORUS, SE., M.Pd
PEMUDA UTARA MELIA
NIP. 196701119198031002

Diisi matriks Renstra Dinas Kominfo Provsu selama 5 tahun

[illegible]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	IJ	JK	JL	JM	JN	JO	JP	JQ	JR	JS	JT	JU	JV	JW	JX	JY	JZ	KA	KB	KC	KD	KE	KF	KG	KH	KI	KJ	KK	KL	KM	KN	KO	KP	KQ	KR	KS	KT	KU	KV	KW	KX	KY	KZ	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MM	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NM	NN	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PU	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TT	TU	TV	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	UJ	UK	UL	UM	UN	UO	UP	UQ	UR	US	UT	UU	UV	UW	UX	UY	UZ	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	VJ	VK	VL	VM	VN	VO	VP	VQ	VR	VS	VT	VU	VV	VW	VX	VY	VZ	WA	WB	WC	WD	WE	WF	WG	WH	WI	WJ	WK	WL	WM	WN	WO	WP	WQ	WR	WS	WT	WU	WV	WW	WX	WY	WZ	XA	XB	XC	XD	XE	XF	XG	XH	XI	XJ	XK	XL	XM	XN	XO	XP	XQ	XR	XS	XT	XU	XV	XW	XX	XY	XZ	YA	YB	YC	YD	YE	YF	YG	YH	YI	YJ	YK	YL	YM	YN	YO	YP	YQ	YR	YS	YT	YU	YV	YW	YX	YZ	ZA	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF	ZG	ZH	ZI	ZJ	ZK	ZL	ZM	ZN	ZO	ZP	ZQ	ZR	ZS	ZT	ZU	ZV	ZW	ZX	ZY	ZZ

[illegible][illegible]

				2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

[illegible][illegible]

4	Personnel Time Allocation Management System Development and Testing (Personnel Time Allocation)	Development and Testing Personnel Time Allocation Development and Testing (Personnel Time Allocation)	12 weeks	100,000,000	12 weeks	100,000,000	12 weeks	100,000,000	12 weeks	100,000,000
5	Personnel Time Allocation Management System Development and Testing (Personnel Time Allocation)	Development and Testing Personnel Time Allocation Development and Testing (Personnel Time Allocation)	12 weeks	100,000,000	12 weeks	100,000,000	12 weeks	100,000,000	12 weeks	100,000,000

Lampiran 4 LHE SAKIP Nama Perangkat Daerah

Diisi Scan LHE SAKIP Nama Perangkat Daerah yang diterima dari

Inspektorat

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT
Jl. KH Wahid Hasyim Nomor 8 Medan

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : 144/14-06/17/PMU
TANGGAL : 12 Juli 2024

II. PELAKSANAAN

A. Waktu Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan dari tanggal 1 April s.d. 15 April 2024 selama 9 (sembilan) hari kerja.

B. Sarunan Pengumpulan

Tim evaluasi terdiri dari:

1. Pengumpul Jarak: Lasso Marhan
2. Wakil Penanggung Jawab Administrasi: Murdanto
3. Wakil Penanggung Jawab Teknis: Riwani Arianing
4. Pengumpul Teknis: Syahru Bahri Ritoraga
5. Ketua Tim: Elvina Lubis
6. Anggota: Jimmy H. Sihotang, Bedan Suherman

C. Batasan Evaluasi

Batasan evaluasi mencakup pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Penyimpulan Data dan Informasi

Nilai hasil akhir dari penyimpulan indikator memberikan gambaran tingkat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan kategori interpretasi sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
> 50 – 100 (AA)	Sangat Memuaskan
> 80 – 90 (A)	Memuaskan

- a. Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis penilaian kinerja sebelumnya, terdapat laporan evaluasi dan pendataan dokumen perencanaan;
- e. Setiap pegawai memahami dan peduli serta berkolaborasi dalam mencapai kinerja yang telah dirumuskan.

B. Pengukuran Kinerja

1. Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan cara:

- a. Terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, definisi operasional sesuai sepenuhnya mengacu pada formulir pengukuran atau cara mengukur kinerja;
- b. Terdapat indikator yang jelas terhadap pencapaian data kinerja yang dapat diukur; mekanisme pengumpulan data masih berdasarkan asumsi dari isu permasalahan;
2. Pengukuran kinerja telah menjadi kepatutan dalam mengukur kinerja secara efektif dan efisien, telah dilakukan secara berjenjang dan terintegrasi dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang ditetapkan; pengumpulan data kinerja telah dilakukan secara menyeluruh;
 - b. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang ditetapkan; telah dilaksanakan monitoring pencapaian target kinerja pada aplikasi monev;
 - c. Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala; pengukuran kinerja belum dilakukan secara berkala;
 - d. Setiap level organisasi melakukan penanaman atau pengukuran capaian kinerja untuk di bawahnya secara berjenjang; pengukuran kinerja diperoleh namun belum secara berkala;
 - e. Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi); hanya menggunakan ms. word, tidak aplikasi monev;
 - f. Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi); hanya menggunakan ms. word, bukan aplikasi monev;
3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment serta penyusunan strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan indikator sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT

Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 8, Medan, Kota Kita 20134
Telp: (061) 4155811-4155810, Fax: (061) 4155814
Email: inspektorat@provinsisumutara.go.id, inspektorat@provinsisumutara.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Privasi Nomor 7092/2023/Provinsu/2024 tanggal 1 April 2024 selama 9 (sembilan) hari kerja dari tanggal 1 April s.d. 15 April 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi bertujuan untuk memberikan keyakinan terhadap mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendukung pengikatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil di instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara.

> 70 – 80 (BB)	Sangat Baik
> 60 – 70 (B)	Baik
> 50 – 60 (CC)	Cukup (Memadai)
> 30 – 50 (C)	Kurang
0 – 30 (D)	Sangat Kurang

III. TAKTAK DAN PERMASALAHAN

Setelah melaksanakan evaluasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, ditemukan fakta dan permasalahan sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja dengan fokus kepada kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkelanjutan dengan kinerja sebagai berikut:

1. Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah sudah sesuai dengan RPJMD;
 - b. Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek, sudah tersedia dengan adanya Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja Eselon II (R dan Fungsional);
 - c. Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja, sudah tersedia pada rencana aksi;
 - d. Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja, sudah tersedia pada DPA Perangkat Daerah;
2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (Cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (Crosscutting) dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Dokumen perencanaan kinerja telah diformulasikan dengan dibuatnya tim kerja dan cap hasil;
 - b. Dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan tepat waktu, sudah dipublikasikan pada website dan media sosial lainnya.

C. Pelaporan Kinerja

1. Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Dokumen laporan kinerja telah disusun, sudah disusun;
 - b. Dokumen laporan kinerja telah disusun secara berkala, belum dilakukan secara berkala;
 - c. Dokumen laporan kinerja telah diarsipkan, belum dilakukan arsip;
 - d. Dokumen laporan kinerja telah dipublikasikan, sudah dipublikasikan di website;
 - e. Dokumen laporan kinerja telah disampaikan tepat waktu, sudah sesuai;
2. Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar pengungkapan kualitas atau pencapaian kinerja, informasi telah lebih lengkap

- 2.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2023;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2024.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud evaluasi AKIP yaitu untuk mengetahui aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, audit, apresiasi dan pengendalian permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan pengungkapan kinerja instansi pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

- a. Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, sudah dimuat dalam Renja namun belum secara keseluruhan;
- d. Kualitas rumusan hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai;
- e. Ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART dan KU sudah SMART;
- f. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, terdapat secara berkelanjutan (sustainable) tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis; IKU telah disesuaikan dengan target nasional;
- g. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang dan realistis sudah terdapat;
- h. Setiap dokumen perencanaan kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading), sudah terdapat;
- i. Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/organisasi dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting), sudah tersedia dengan melibatkan stakeholder terkait;
- j. Setiap pegawai memahami dan menetapkan perencanaan kinerja, sudah ditetapkan;
3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Anggaran yang ditetapkan dalam DPA namun belum secara menyeluruh, aktivitas telah sesuai;
 - b. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track;

- Pengujian informasi dalam laporan kinerja menjadi kapadukan seluruh pegawai, sudah disampaikan namun belum secara menyeluruh.
- Informasi dalam laporan kinerja belum telah digunakan dalam penyusunan aktivitas untuk mencapai kinerja, dilakukan secara berkala dan belum secara menyeluruh untuk menyesuaikan aktivitas kinerja.
- Informasi dalam laporan kinerja belum telah digunakan dalam penyusunan pengisian pegawai untuk mencapai kinerja, sudah dilakukan namun belum secara menyeluruh.
- Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, sudah dilakukan namun belum secara menyeluruh.
- Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya, sudah dilakukan namun belum secara menyeluruh.
- Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi, sudah dilakukan namun belum secara menyeluruh.

B. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Tingkat lanjut rekomendasi hasil evaluasi dengan indikator:
 - Seluruh rekomendasi atau hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti, rekomendasi belum ditindaklanjuti secara menyeluruh.
- Capaian output dengan indikator:
 - Terdapat jejak pertunjukan dan pengikutian kinerja (output) dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sudah ada pertunjukan kinerja namun belum secara menyeluruh.
- Capaian outcome dengan indikator:
 - Terdapat jejak pertunjukan dan peningkatan kinerja (outcome) dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sudah dimanfaatkan hasil evaluasi sebagai pertunjukan kinerja namun belum secara menyeluruh.

IV. ANALISA

Berdasarkan fakta dan permasalahan, penilaian terhadap seluruh kriteria yang dievaluasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara memperoleh nilai 76,65 dengan rincian sebagai berikut:

- Penyusunan kinerja memperoleh nilai 25,20 terdiri dari:
 1. Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia dengan nilai 6,00;
 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik dengan nilai 7,20;
 3. Pelaksanaan kinerja telah dilaksanakan untuk menunjukkan hasil yang berkembang dengan nilai 12,00.
- Pengukuran kinerja memperoleh nilai 26,00 terdiri dari:
 1. Terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur dengan nilai 4,00;
 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebiasaan dalam mencapai kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan nilai 7,20;
 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment serta penyusunan strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan nilai 12,00.
- Pelaporan kinerja memperoleh nilai 9,75 terdiri dari:
 1. Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja dengan nilai 2,10;
 2. Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan dengan nilai 3,15;
 3. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyusunan strategi/subjekan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan nilai 4,50.
- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal memperoleh nilai 17,50 terdiri dari:
 1. Tingkat lanjut rekomendasi hasil evaluasi dengan nilai 6,00;
 2. Capaian output dengan nilai 2,50;
 3. Capaian outcome dengan nilai 6,30.

V. KESIMPULAN

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 dilakukan secara monitoring, pertanggung jawaban pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil dengan nilai sebagai berikut:

No	Kriteria	Nilai	Kategori
1.	Penyusunan Kinerja	25,20	B0
2.	Pengukuran Kinerja	26,00	
3.	Pelaporan Kinerja	9,75	
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	17,50	
Total		78,45	

menyatakan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara mendapatkan nilai 76,65 dengan kategori B0 (Sangat Baik) dan perlu dilakukan perbaikan untuk meningkatkan kategori A (Memuaskan) serta dipejatkan kategori nasional AA (Sangat Memuaskan).

VI. REKOMENDASI

- Atas hal tersebut, Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Inspektoral Provinsi Sumatera Utara menyarankan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara agar:
- Membangun aplikasi monitor untuk pengumpulan data kinerja dan mengolah capaian kinerja;
 - Mewajibkan dokumen Laporan Kinerja;
 - Dokumen Laporan Kinerja menginformasikan pencapaian realisasi kinerja di level nasional/kemendagri (benchmark kinerja);
 - Pengujian informasi dalam Laporan Kinerja menjadi kapadukan seluruh pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara;
 - Membuat Laporan Kinerja secara berkala (per bulan).

VI. PENUTUP

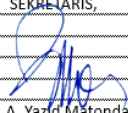
Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 ini disusun berdasarkan data dan fakta yang diperoleh selama pelaksanaan evaluasi.

Laporan ini merupakan dokumen pengawasan yang bersifat rahasia, tidak bisa diberikan, disampaikan dan diterbitkan kepada pihak yang tidak berkepentingan (Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017).

Medan, 2024	
Tim Evaluasi	
 Laila Martini Kepala Dinas Madani NIP. 198410511843511002	1. Mubandari NIP. 197202041998020001
	2. Raniy Azzahra NIP. 197801011998020001
	3. Satrio dan Satrio NIP. 198802091992030001
	4. Eliza Elza NIP. 1985050500198505002
	5. Janny Hinda Satrio NIP. 197802020010010101
	6. Satrio Satrio NIP. 198203080010010008
Kepala Penanggung Jawab Administrasi Wakil Penanggung Jawab Teknik Responden Teknik Ketua Tim Anggota Anggota	

Lampiran 5 Tanggapan/ Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023 (Jika ada)

Diisi Scan Tanggapan/ Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023 (Jika ada).

Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023					
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara					
No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progress Pelaksanaan
1	Membangun aplikasi monev untuk pengumpulan data kinerja dan mengukur capaian kinerja	Melakukan Perencanaan Pembangunan aplikasi Monev	Masih dalam Proses Perencanaan	Kepala Dinas Dinas Kominfo Provsu	Dalam proses pembahasan
2	Merevisi dokumen Laporan Kinerja	Melakukan Perbaikan dokumen kinerja untuk pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan	Pertriwulan	Kepala Dinas Dinas Kominfo Provsu dan Kepala Bidang	Melakukan rapat dan pertemuan dengan bidang untuk perbaikan kinerja
3	Penyajian informasi dalam Laporan Kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara	Menyusun Laporan Kinerja dengan menyajikan informasi pencapaian target kinerja	Pertriwulan	Kepala Dinas Dinas Kominfo Provsudan seluruh ASN	Rapat dengan seluruh ASN dalam rangka penjadia informasi dalsm laporan kinerja
4	Membuat Laporan Kinerja secara berkala (per triwulan)	Melakukan rekapitulasi realisasi hasil capaian target kinerja	Pertriwulan	Kepala Dinas Dinas Kominfo Provsu dan Kepala Bidang	Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang
Medan, 2025					
An. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
SEKRETARIS,					
					
A. Yazid Matondang, S. Sos					
PEMBINA TINGKAT I					
NIP 196905281998031003					

Lampiran 6 Prestasi Perangkat Daerah Tahun 2024 (Jika Ada)

Diisi Scan bukti prestasi Perangkat Daerah Tahun 2024